

B A B I V

NU DALAM SISTIM DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Situasi Dan Kondisi.

Pada bab III diatas telah banyak penulis singgung, bahwa setelah Presiden Soekarno dapat merebut seluruh jaringan kekuasaan maka tindakan selanjutnya semakin meluas, dengan demikian ia semakin mudah untuk merealisasikan konsepsinya dalam menyatukan golongan Agama, Nasionalis dan Komunis (NASAKOM) yang telah lama diinginkan.

Keinginan itu terlihat jelas pada amanat Presiden 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan rumusannya Revolusi Kita (JAREK). Dalam amanat Presiden itu Soekarno menjelaskan :

"Di Indonesia itu memang ada tiga golongan besar, "revolutionaire krachten", yaitu: Islam, Nasional dan Komunis. Senang tidak senang, ini tidak bisa dibantah lagi. Dewa-dewa dari kayangan pun tidak bisa membantah kenyataan ini! Jikalau benar-benar kita setia kepada revolusi.....setia kepada jiwa gotong royong, persatuan, "samen bundeling" adalah keharusan dalam perjuangan anti imperialisme dan kapitalisme, maka kita harus mewujudkan persatuan antara golongan Islam, golongan Nasional dan golongan Komunis itu. Maka kita tidak boleh menderita penyakit Islamo-phobi, Nationalisto-phobi, atau Komunisto-phobi.

1

Chairul Anam, Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahlotul Ulama', Jatayu, Sala, Cet, Pertama, 1985, hal. 222.

Rumusan itulah yang akhirnya populer dengan ungkapan "nasakom jiwaku". Nasakom ini pun diwujudkan dalam seluruh lembaga negara baik DPAS, DPR-GR, Front Nasional dan sebagainya, sehingga arah revolusi Indonesia dari tahun ketahun semakin bergeser ke kiri. Banyak gagasan - Bung Karno yang berbahu Komunis. Peluang-peluang politik banyak diberikan oleh Bung Karno kepada PKI. Dengan demikian tindakan PKI semakin bebas dan semakin mengarah pada sasarannya. Apa lagi kalau ide-idenya sealur dengan ide dan pemikiran Presiden Soekarno. Sedang partai - partai politik lainnya khususnya NU sendiri pada waktu itu masih diam berbungkan seribu bahasa tidak berani menentang tindakan Presiden Soekarno, karena bila ia salah langkahnya maka akan berakibat fatal selamanya bahkan akan dicap sebagai Komunisto-phobi.

Sebagaimana digambarkan oleh Idham Chalid, bahwa semenjak Dekrit Presiden tahun 1959 sampai dengan tahun 1961, tokoh-tokoh NU sedang mengalami keperihatinan yang mendalam, pikiran mereka dipenuhi pertanyaan-pertanyaan, apakah NU masih diperbolehkan hidup atau tidak?, mereka takut tergilas penpres No. 7 1959 dan Penpres No. 13 1960, tentang penyederhanaan partai dan syarat-syarat partai yang berhak hidup. Bahkan ketika itu beberapa tokoh NU ada yang berpendapat kembali ke jam'iyah, ada pula yang mengusulkan untuk mengubah menjadi yayasan yang mengurus

Madrasah, Panti Asuhan, Rumah Sakit, Pendidikan dan - bidang-bidang sosial lainnya. Dan banyak tokoh-tokoh NU Daerah yang menanyakan nasib partai NU apakah NU masih diperbolehkan hidup dan berhak hidup?

Ahirnya beberapa pimpinan NU mengadakan musyawarah dengan menguras tenaga dan pikiran untuk bisa memenuhi persyaratan sebagai partai yang berhak hidup. Pada tanggal 15 April 1961, Presiden Soekarno menetapkan putusannya untuk delapan partai politik yang diakui boleh hidup satu diantaranya adalah NU, bahkan ketika itu NU menempati posisi paling besar dilihat dari anggotanya.

Namun demikian sekalipun jumlah NU tampak besar partai NU masih berada dalam posisi defensif, NU tetap tidak mempunyai keberanian untuk melahirkan pendiriannya, karena takut ditindak oleh Bung Karno dan dibubarkan.

Lama kelamaan arah revolusi Indonesia semakin condong ke RRT dan negara-negara sosialis atau komunis lainnya, dan sejak itu gagasan Bung Karno mulai tampak berbahu komunis.² Garis-garis politik Indonesia ditarik dengan garis RRT. Dan sebagai puncak daripada paralisasi-luar Negeri Indonesia dengan luar negeri RRT ini adalah diciptakannya poros Jakarta Peking Phenompen sebagai

²Chalid Mawardi, Pratica Politica Nahdlatul Ulama' Jilid I, Yayasan Pendidikan Pratica, Jakarta, t. t. hal. 37.

poros anti imperialisme dan kemudian penarikan keanggotaan Indonesia dari PBB. Sedang politik dalam negeri Bung Karno memusatkan seluruh jaringan kekuasaan dalam genggaman tangannya, dengan terlebih dahulu mengeluarkan Doktrin "RESOPIM". Peluang-peluang politik banyak diberikan pada PKI sehingga PKI semakin berani dan kurang ajar, ia mengadakan demonstrasi liar, dengan mempertajam hubungan Indonesia dengan Barat, kemudian aksi-aksi sepihak di bidang agraria dilancarkan terus menerus, penyerobotan tanah dan pembabatan hutan-hutan secara liar dilakukan, dan kalau ada yang menentang aksi-aksi PKI akan dicap sebagai Komunistophobi dan dicap kontra revolusi.³

Tindakan selanjutnya agar PKI segera dapat mewujudkan cita-citanya maka dibentuklah angkatan bersenjata baru yang terdiri para kaum tani (BTI) agar jaringan politik bertambah kuat dari pada lainnya. Namun usaha ini mendapat tantangan dari pihak angkatan Darat sebagai usaha mengimbangi rencana pembentukan angkatan ke lima itu termasuk Menko (Mentri Koordinator) Hamkam segera membentuk pertahanan sipil (Hansip) dan Resimen-resimen Mahasiswa (Menwa).

Selain itu konsep Intrograsi ABRI berpusat di Ham-

³AZ. Abidin, Baharuddin Lopa, Bahaya Komunisme, - Bulan Bintang, Jakarta, Cet Ke III, 1982, hal. 224.

kam yang pernah diusahakan melalui kerja sama keempat kepala staf ABRI semakin diperkuat tetapi usaha ini berhasil dihalau oleh Presiden Soekarno, ini merupakan hasil intrik-intrik PKI kepada Presiden Soekarno dalam rangka mengurangi peranan ABRI dalam sistim politik dimasa itu.

Lebih jelas lagi usaha Presiden menghalangi ABRI berpusat pada Hankam merupakan langkah awal PKI mengacaukan tubuh ABRI, yaitu ketika terjadi pencopotan jabatan KSAD dari Jendral AH. Nasution pada Juni 1962. Jabatan itu kemudian dipercayakan kepada Jendral A. Yani yang juga merangkap sebagai Kepala Staf Komando Tertinggi di Istana. Searah dengan itu, Presiden segera melakukan perubahan struktur komando ABRI yang berpusat di istana melalui Hankam. Dengan demikian, maka seluruh kekuatan ABRI tidak dikomando dari Hankam, melainkan dari istana. Dan ini berarti pula kekuatan ABRI di tangan Presiden. PKI telah merasa berhasil melumpuhkan kekuatan ABRI. Sebab tersingkirnya KSAD Jendral Nasution pimpinan AD yang terkenal anti komunis ini, berarti PKI telah mudah melancarkan-citanya menyusup ke tubuh angkatan tersebut.⁴

Sejak Dr. Subandrio menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Inteljen (BPI) tahun 1962, ditambah pula meninggalnya PM Djuanda 1963 dan diganti oleh Dr. Subandrio, semakin mudah PKI membuat fitnahan, mereka membuat laporan

⁴Chairul Anam, Op. Cit., hal. 225.

palsu, akibatnya banyak tokoh yang dituduh sebagai eks grombolan, subversif, agen Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim). Namun usaha untuk menjatuhkan TNI AD tidak berhenti sampai disini saja, PKI membuat tipu muslihat apa yang disebut dengan dokumen "Gilchrist" yakni sebuah telegram rahasia dari Duta Besar Inggris yang kemudian konsepnya jatuh ke tangan agen-agen PKI. Dan konsep itu kemudian dikirim secara kaleng kepada Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio. Diantara isi surat seolah-olah ada persekutuan antara Washington dan London untuk mengadakan serangan kepada Indonesia, yang mengikut sertakan sejumlah angkatan tertinggi TNI AD.

Dokumen itu kemudian dilaporkan Dr. Subandrio kepada Presiden dan diperbanyak serta diedarkan ke negara Asia Afrika atau negara lain yang bersahabat dengan Indonesia, tujuannya untuk memberitahukan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya hendak diserang negara-negara Imperialis Kapitalis yang mengikut sertakan perwira tinggi TNI AD, sehingga tipu muslihat itu berhasil dengan mendiskreditkan korp TNI AD, bahkan berbagai tuduhan dalam bentuk ucapan keras ekstrim dan radikal sangat menekan, misalnya "ganyang setan desa", "ganyang setan kota", "ganyang kabir" (kapitalis birokrat), "bentuk Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom", "bentuk Angkatan V", "laksanakan Manipol Usdek secara konsekuen", "intensifkan konfrontasi

Malasyia, ganyang kebudayaan Barat, (Musik ngak-ngik - ngok), menopoli politik adalah Durno. Mercusuar dan poros Jakarta Peking dan sebagainya.⁵

Setelah eksistensi NU diakui dan beberapa bulan sebelum itu terjadi pemusatan politik "Poros Jakarta Pe - king" yang mengakibatkan arah politik condong ke kiri, - maka NU segera mengadakan konsolidasi organisasi, NU su - da melihat tindakan-tindakan politik semakin berani dan - keras, Sehingga perlu dihadap disegala bidang disegala medan juang. Seperti yang dikemukakan oleh KH. Saifuddin- Zuhri:

"Perlawanan NU terhadap PKI dilakukan disemua me - dan juang. PKI menggerakkan massanya, NU mengorga - nisasi pemuda Ansor menjadi Banser yang lebih mi - litan. PKI menggerakkan Lekranya, NU mengaktifkan Lesbumunya. PKI menyanyikan lagu Genjer-Genjer - yang penuh hasutan dan sindiran, NU mengobarkan - bacaan Shalawat Badar..... NU mengobarkan semangat perlawanan terhadap PKI sebagai kelanjutan peris - tiwa aksi PKI di Madiun 1948.⁶

Perlawanan NU terhadap PKI yang dilakukan diselu - ruh medan juang; itu tidak hanya pada forum musyawarah tetapi lebih dari itu perlawanan dilakukan secara fisik - agar konsentrasi PKI menjadi terganggu, dan tindakan NU dilaporkan pada Presiden sehingga NU mendapat peringatan- keras karna NU sudah berani melawan aksi revolusioner.

⁵ Ibid, hal. 227.

⁶ Ibid, hal. 237.

Tibalah sudah puncak kebencian PKI ini dengan cara yang keras dan radikal di tahun 1964 dengan melancarkan gerakan aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI terutama aktivitas Barisan Tani Indonesia (BTI). Dengan memaksa membagi tana dan hasil pertanian khususnya di Jawa demi keuntungan politik tertentu baik dikalangan masyarakat atau elit politik kalangan atas. Usaha PKI ini diimbangi oleh NU dengan membentuk barisan PERTANU, LESBUMI, SARBUMUSI, Fatayat, Muslimat, IPNU-IPPNU, PMII, Pemuda ANSOR dan lainnya untuk menghadapi kemungkinan yang buruk dari akibat yang ditimbulkan oleh aksi sepihak PKI.⁷

Setelah NU melihat perkembangan PKI dari hari ke-hari solidaritas komunis semakin kuat dan barisannya semakin rapat, maka NU segera membentuk solidaritas ummat Islam se Dunia pada tanggal 6-14 Maret 1965 dilansungkan KIA (Komperensi Islam Asia Afrika) di Bandung dengan dihadiri 155 delegasi yang mewakili 33 negara.

Pada Komperensi Asia Afrika ini memilih "Lajna Tanfidiyah" terdiri dari KH Idhan Chalid dari Indonesia, Dr. Hubballah dari Mesir, Al Haj Ya'kub dari Nijeria, Syeh Abdul Aziz dari Arab Saudi, Profesor Hamid Ahmad Khan dari Pakistan, sedangkan sekretaris Jendralnya ditunjuk KH. Syaihu dari Indonesia, dan Faladun Dasumamba

⁷Ibid, hal. 237.

dari Philipina dan ditambah lagi 2 orang anggota masing - masing dari Iraq dan Tailand.⁸

Demokrasi KIA ini untuk menggalang persatuan Ummat Islam se Dunia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dakwah, kerjasama internasional, perdamaian dunia maupun perhatian nasib ummat Islam di negara-negara non Islam perlu ditingkatkan.

↓ Tentu saja dengan terbentuknya KIA itu membuat politik dalam negeri semakin panas. Aksi-aksi PKI semakin brutal dan nekad. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan ummat Islam lebih merapatkan barisannya. Pada tanggal 12 Maret 1965 NU bersama Muhammadiyah Al Wasiliyah dan Gasbindo serta Syarikat Islam menggalang persatuan. Apa saja yang terjadi harus dihadapi secara bulat. Namun demikian PKI tetap apatis dengan barisan ummat Islam, karna ia berkeyakinan seluruh lawan politiknya akan berhasil di singkirkan, bahkan satu-satunya lawan politiknya yang paling dibenci yakni TNI AD sudah didiskreditkan melalui fitnah-fitnah yang telah disebar luaskan sehingga gerakannya semakin nekad dan buas.

Pada bulan Juli dan Agustus 1965, CGMI dan PR (Pemuda Rakyat) mengadakan latihan-latihan rahasia dilubang Buaya. Melihat kenyataan yang menghawatirkan itu H.M. Subhan ZE, yang sejak lama telah menggalang persatuan-ummat Islam antara HMI, PMII, Pemuda ANSOR, Muhammadiyah-

⁸Ibid, hal. 240.

dan sebagainya. segera mengadakan kontak dengan pemuda lainnya hususnya dari partai katolik dan kristen, terutama PKRI.

Setelah ada kata sepakat mengadakan latihan ke- militeran untuk mengimbangi kekuatan PKI maka latihan segera dimulainya tanggal 1 Oktober 1965 dengan melibatkan TNI AD, ternyata hal itu sudah didahului oleh meletusnya- gerakan 30 September /G 30 S/PKI.⁹

Sebelum subuh tanggal 1 Oktober 1965 Gestapu sudah meletus dengan dibawa pimpinan Letkol Untung, Komandan - Batalion Kawal Kehormatan Cakra Birawa dibantu Kolonel Dul Latif, Brigjen Suparjo serta didukung satu kompi Pa - sukan Cakra Birawa, satu Batalion 454 dari Jawa Tengah - dan satu Batalion 530 dari Jawa **Timur** mereka berhasil menculik dan menembak mati Jendral Ahmad Yani Menteri/ Panglima TNI AD di ruma kediamannya dan dibawa ke Lubang- Buaya yang telah disediakan sebelumnya, berikutnya menyusu- sul Mayor Jendral Hariyono (Deputi husus) Mayor Jendral Suprpto (Deputi Pembina) Mayor Jendral Suparman (asis- ten I) Brigadir Jendral D.I Fanjahitan (asisten IV) Bri- gadir Jendral Sutoyo Siswomiharjo (Direktor Kehakiman - Editor Jendral).

⁹
I b i d, h a l. 241.

Bedangkan Jendral Ahmad Nasution Mentri Koordina -
tor Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata sempat lolos
dari sergapan Gestapu PKI, Namun Putrinya yang masih ber-
usia lima tahun, menjadi korban keganasan PKI. Selain itu
ajudan Jendral Ahmad Nasution Letnan I Pioree Tendean -
dibunuh secara keji pula oleh PKI di tempat yang masa, -
seperti yang dialami perwira TNI Angkatan Darat yang lain.

Penculikan itu bukan hanya dilakukan di Jakarta -
saja tetapi di Daerah lain seperti Jogja yang oleh Mayor
Mulyono dengan berhasil menculik dan membunuh Kolonel
Katamso Letkol Sugiono dan lain sebagainya.

Setelah mereka berhasil menculik dan membunuh maka
mereka segera menduduki tempat-tempat vital, kantor Tel -
pon dan Studio Radio RRI dan pagi-pagi menyiarkan siaran
berita palsu bahwa perbuatannya itu dilakukan dengan da -
lih untuk menggagalkan rencana Dewan Jendral untuk mere -
but kekuasaan Presiden Soekarno pada 5 Oktober mendatang.
Kemudian pada pukul 12.30 tanggal 1 Oktober Letkol Untung
menyiarkan berita liwat RRI bahwa Kabinet Kerja yang di -
pimpin Soekarno telah dibubarkan dan sejak hari itu pusat
kekuasaan berada ditangan Dewan Revolosi yang dipimpin -
Letkol Untung.¹⁰

 10

Ibid, hal. 242.

Ternyata setelah diadakan pengusutan terhadap -
 pelaku Gestapu yang menculik dan membunuh perwira dilu -
 bang buaya ternyata gerakan kontra **revolusi G. 30 S/** PKI
 adalah gerakan yang direncanakan dan didalangi oleh Par -
 tai Komunis Indonesia, oleh karna itu disebut G. 30 S /
 . PKI, dengan bantuan PR (Pemuda Rakyat), GERWANI (Gera -
 kan Wanita Indonesia) CBMI (Consentrasi gerakan Mahasis -
 wa Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), HSI (himpu -
 nan Sarjana Indonesia), SOSBI (Sentral Organisasi Buruh -
 Indonesia), dan sebagainya.¹¹

NU sudah tidak bersifat semu lagi, NU segera meng-
 gerakkan semua ormasnya bersama ormas Islam lainnya bah -
 kan orang Katolik sekalipun untuk mengusut dan membasmi
 kebrutalan PKI itu. Dengan kebersatuan umat Islam pada
 waktu itu maka dalam jangka yang singkat PKI dapat dibumi
 hanguskan dan dilarang dan dikutuk sebagai partai ter -
 larang di Indonesia.

Apalagi setelah NU menemukan dukumen yang berisi
 daftar hitam yang isinya akan menculik dan membunuh para
 Ulama' dan para Kyai. NU bertambah marah tindakannya ber-
 tambah keras dimana-mana terjadi mof pemberontakan di-
 kota -kota dan di desa untuk menumpas dan mengutuk Gest-
 tapu liwat siaran RRI, publikasi, surat kabar dan majalah

¹¹Ibid, hal. 242.

baik dalam maupun luar negeri, setelah itu PB NU segera mengeluarkan resolusi mengutuk Gestapu antara lain: 1. Mendesak Presiden Soekarno untuk segera membubarkan PKI dan seluruh antek-anteknya. 2. Mencabut surat izin terbit siet seluruh media cetak baik yang langsung maupun tidak langsung telah membantu Gestapu PKI dan 3. Menyerukan kepada seluruh umat Islam agar membantu sepenuhnya kepada ABRI dalam usahanya mengembalikan ketertiban Nasional akibat gerakan G 30 S/PKI.¹²

Demikianlah sedikit sekitsa atau gambaran tentang situasi dan kondisi politik Indonesia sejak terciptanya Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959 sampai dengan tahun 1965.

Uraian diatas adalah merupakan sekitsa kasar atau gambaran tentang kondisi negara dan global umat manusia Bangsa Indonesia dimasa itu. Gambaran dimaksud menunjukkan bagaimana eksistensi NU terutama ABRI dimasa Demokrasi Terpimpin tersebut. Dengan kata lain, bahwa pada masa itu seluruh kekuatan politik dibuat tidak berdaya yang berperan hanyalah PKI dan ABRI serta Presiden Soekarno sebagai pemegang kunci keseimbangan antara kedua kekuatan yang saling berhadapan.

¹² Ibid, hal. 243-244.

B. Setrategi NU Dalam Menghadapi Demokrasi Terpimpin.

Tepat pada tanggal 14-18 Desember 1959 partai politik 'Majlisatul Ulama' sedang mengadakan Muktamarnya yang ke 22 di Jakarta. Muktamar NU ke 22 tersebut adalah semata-mata untuk memecahkan suatu permasalahan - tentang eksistensi NU itu sendiri dalam rangka meng - hadapi isu sentral politik Presiden Soekarno yang - serba sulit dan komplek itu.

Sejak terlaksananya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berarti Indonesia sudah tidak lagi menganut Demokrasi Lebral tetapi berganti dengan Demokrasi Terpimpin - sebab menurut Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin ini masyarakat Indonesia akan dapat aman dan tentram karna sudah sesuai dengan tuntutan jiwa revolusi Indonesia. Namun eroninya setelah Dekrit itu tindakan - tindakan Presiden Soekarno semakin banyak yang tidak sesuai - dengan UUD 1945. Apalagi Soekarno mempunyai gagasan - untuk memasukkan PKI kedalam Kabinet, yakni Kabinet berkaki empat PNI, Masyumi, NU dan PKI. Tindakan - beliau semakin jauh dari pancasila dan UUD 45 sehingga suhu politik menjadi serba sulit.

Didopan peserta Muktamar Idham Chalid menjelaskan bahwa keadaan negara disaat itu memerlukan kebijaksanaan dan cara yang banyak berberda dari keadaan normal dari keadaan sebelumnya. Dalam arti untuk meng-

hadap dimasa itu diperlukan taktik dan setrategi yang serba baru , ukuran setrategi lama sudah tidak sesuai lagi dengan yang ada untuk menghadapi situasi yang serba-darurat itu. Sebab itu ummat Islam hususnya NU sulit untuk menentukan jati dirinya, namun bukan berarti dengan kesulitan itu lalu NU tidak mempunyai sikap. Sebagai partai politik tentu saja mempunyai sikap hanya saja sikap itu tidak dimumkan.¹³

Kemudian apakah setrategi ^{tohu usuh} pokok NU dalam mengaruhi Demokrasi Terpimpin itu ? kemudian apakah setrategi itu disandarkan pada politik pragmatis realistis belaka atau pertimbangan agama juga. untuk mendasari setrategi itu dalam hal ini KH Syahu menjelaskan bahwa dalam menghadapi Demokrasi Terpimpin ummat Islam Indonesia mempunyai dua ijtihad politik yang berbeda.⁴ Ijtihad pertama berkesimpulan bahwa ummat Islam lebih baik masuk dalam sistim itu demi kepentingan Islam, sebab kalau tidak maka pasti akan diduduki oleh golongan lain (PKI) akan semakin menerjang dengan bebas. Sedangkan ijtihad kedua berpendapat bahwa demi kepentingan Islam pula maka ummat Islam harus melawan sistim itu. Ijtihad pertama hasil pemikiran sayap pesantren, sedangkan ijtihad yang kedua ini adalah

13

Ibid, hal. 228.

pemikiran sayap modernis. Dan dari kedua ijhtihad ini sama-sama berdalil agama.¹⁴

Dengan pendapat KH. Syaibu di atas jelas bahwa bagi NU sudah tidak meragukan lagi, bahwa turut dalam jaringan-kekuasaan sentral politik Presiden Soekarno adalah atas dalih agama, dengan demikian maka akan sampai pada apa yang penulis jelaskan pada bab yang terdahulu di atas, bahwa NU menyetujui Demokrasi Terpimpin dengan titik tekannya pada Demokrasinya, dalam arti Demokrasi tanpa pimpinan akan menjurus pada anarhi, sedangkan pimpinan tanpa Demokrasi akan menuju pada diktator.

Begitu juga ketika NU menghadapi ide-ide Presiden Soekarno dalam mempersatukan partai-partai Islam dalam kerja sama Nasakom, NU secara formal telah menyetujui yakni NU telah masuk kata gori revolusioner dengan melalui pertimbangan yang sangat sensitif dan prefentif NU menyetujuinya. Sebab pada saat itu tidak ada pilihan lain bagi partai-partai politik kecuali harus berhadapan dengan revolusioner atau kontra revolusioner. Sedang kenyataan yang ada disaat itu bahwa semakin focal teriakan suatu kekuatan politik dalam meneriakkan politik Nasakom maka semakin dikategorikan sebagai revolusioner sekalipun

14

Syafi'i Ma'arif, Islam dan Politik di Indonesia - pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), IAIN Sunan Kali Jogo, Yogyakarta, 1988, hal. 94.

teriakan itu mungkin hanyalah sekedar cara untuk menyelamatkan diri dari kecurigaan Presiden Soekarno dan PKI.

Tokoh-tokoh NU berkeyakinan bahwa NU akan tetap hidup jika saja NU pandai-pandai menari sesuai dengan irama politik Nasakom, pikiran politik NU ini dapat mengundang gaya politik Islam yang lain. Partai-partai politik yang lain dalam menghadapi isu politik lebih banyak mengikuti gaya NU sebagai kekuatan Islam resmi terbesar disaat itu.

Berikutnya bisa kita lihat doktrin pesantren yang dianut NU dalam berpolitik sebagai setrategi pokoknya sebagaimana yang telah dijelaskan lagi oleh Syaifuddin Zuhri yang pada waktu itu berfungsi sebagai sekretaris jenderal partai;

Partai NU telah bertekad, kita harus tampil ke depan memasuki semua kesempatan yang tersedia, karena biar bagaimana orang yang menggunakan kesempatan ini akan lebih banyak bisa berbuat dari pada di luarnya. Politik NU yang dipadati oleh unsur agama, pandangannya yang diasuh toleransi dan maju, - itu telah menggariskan suatu tradisi dan oleh sebab itu akan terus berkembang.

Demikianlah sikap dan setrategi politik yang NU yang sangat lentur dan kenyal dalam menghadapi suhu politik Presiden Soekarno yang serba radikal di masa pereode-Demokrasi Terpimpin. Sikap inilah yang membuat NU bisa

menari bersama irama generang Presiden Soekarno.

Kelenturan sikap NU ini bisa kita lihat sejak pertama kali Presiden Soekarno mempunyai gagasan untuk mengemukakan Dekrit dan menyusul gagasan Demokrasi Terpimpin, kemudian berjalan sampai pada terbentuknya kabinet Kerja dan dibentuknya DPR menurut UUD 1945. DPAS dan Dewan Perancang Nasional (Depernas), semuanya itu NU menghadapi dengan lapang dada dan mengambil setiap kesempatan yang ada yang mungkin diberikan kepada NU dengan sebaik-baiknya. Ia tidak lalu bermata gelap dan berposisi tapi ia tetap berusaha keras memanfaatkan kesempatan secara selektif mungkin untuk menghalau PKI.

Oleh sebab itu apa yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diterima dengan terbuka dan toleransi, dan memang hal itu dalam NU sangat dijunjung tinggi karena itu sudah menjadi karakteristik NU. Namun demikian bukan berarti NU hanyut dalam kegelapan serta mengorbankan prinsip, tapi itu merupakan satu-satunya sikap yang paling baik pada saat itu. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ro'is Am PB NU KH. Wahab Chasbullah; sebagai berikut :

" Jadilah seperti ikan hidup! ikan itu selagi dia masih hidup, masih mempunyai roh atau nyawa, biar seratus tahun hidup di laut yang mengandung garam dia tetap tawar dagingnya, tidak menjadi asin sebabnya dia mempunyai roh karena dia hidup dengan seluruh jiwanya. Sebaliknya, kalau ikan itu sudah mati, sudah tidak mempunyai nyawa, tiga menit saja

taruh dia di kuwali yang bergaram, maka dia akan menjadi asin rasanya.¹⁶

Fatwah rois am itu tentu saja ditujukan kepada segenap warga NU dengan bersikap yang kenyal luwes elastis dalam menghadapi konstalasi politik yang serba tidak menentu. Agar NU dapat menampung semua persoalan yang berkembang disaat itu dengan kelapangan dada sebagaimana ikan yang hidup di air tawar ataupun di air asin.

Karena itu sikap politik NU mudah dipahami, NU mewujudkan sikap yang lunak, defensif dalam menghadapi muv-muv politik Presiden Soekarno, misalnya saat pembentukan DPR-GR, DPAS, DEPERNAS dan lain sebagainya. Meskipun pada awalnya di dalam tubuh NU sendiri terjadi pro kontra mis anderstanding namun ahirnya toh dapat disatukan pula.

Sikap semacam itu ditempuh NU, antara lain supaya lebih mudah mendapatkan kesempatan dan dapat memanfaatkannya secara efektif untuk mengimbangi politik PKI, misalnya, tiga orang duduk dalam DPAS mewakili NU masing-masing adalah KH. Wahab Chasbullah, KH. Idham Chalid dan KH. Saifuddin Zuhri, selama berbulan-bulan Dewan ini bersaing membicarakan tentang Sosialisme Indonesia, Landerform dan Pancasila.¹⁷

16

¹⁷Chairul Anam, Opcit, hal. 231.

Ibid, hal. 232.

Sebagaimana penulis singgung pada bab III di atas bahwa tokoh-tokoh PKI di DPAS menghendaki Sosialisme Indonesia sebagaimana sosialis Komunis ala Mosko maupun Peking (Beijing). Begitu pula tentang Landerform PKI menghendaki pembagian tanah sama rata, sama rasa, dan menghapus hak milik, dua persoalan ini selalu menjadi perhatian wakil NU, tiga wakil ini selalu mengimbangi konsep PKI dan secara tidak langsung menghalau pikiran-pikiran PKI yang mengancam pancasila. NU mengemukakan konsepnya bahwa sosialisme Indonesia bukanlah sosialisme ala Mosko atau ala Peking. Sosialisme Indonesia adalah suatu sosialisme yang berdasarkan pancasila, begitu pula tentang ide lander form.

Dalam rangka pembangunan negara pada prinsipnya NU menyetujui lander form selama gerakan tersebut tidak melenyapkan hak milik pribadi maupun warga negara karena menurut Islam hak milik harus dilindungi dan dipertahankan.

Oleh karena itu NU mengajukan pendapatnya mengajak pemerintah supaya mengarahkan masyarakat untuk bertransmigrasi secara berencana dan serius demi pemanfaatan tanah-tanah luar Jawa yang masih kosong. Disamping itu gejolak sosial yang ditimbulkan oleh gerakan pembagian hak milik bisa dicegah. Namun demikian PKI yang mempunyai inisiatif politik tentu saja menginginkan adanya sosialisme

Marxisme yang cenderung melenyapkan hak milik pribadi - untuk menimbulkan huru-hara dan kekacauan politik kemu - dian bisa dieksploitasi sebagai sarana untuk merebut keku - asaan dengan jalan kekerasan.

Usaha untuk mengimbangi politik PKI dilakukan oleh NU ditempuh dengan berbagai macam bidang, termasuk juga - bidang ekonomi, untuk menyehatkan ekonomi nasional kita NU mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk National plening bord dan perencanaan menuju ekonomi nasional yang sehat. NU mengusulkan agar badan itu dipimpin langsung - oleh Dr. Muhammad Hata dan ide National Plening Board inilah yang dikembangkan menjadi Depernas Bapernas dan akhirnya kita kenal Pelita dan Repelita sekarang ini.¹⁸

Selanjutnya demi kepentingan NU pula, NU berusaha mendekati Presiden Soekarno. Hal ini dilakukan oleh KH. Wahab Chasbullah dengan pemberian nama Muhammad didepan nama Soekarno sehingga menjadi Muhammad Soekarno dengan demikian ikhtisap persaudaraan Presiden dengan KH. Wahab - menjadi erit. Ketika DPAS sedang membicarakan masalah Irian Barat KH. Wahab Chasbullah memberikan saran-saran - yang terkenal dengan diplomasi cancut tali wondo. Artinya untuk dapat merebut Irian Barat dari tangan Belanda ter - lebih dahulu kehidupan politik harus sehat, partai-partai

18

Ibid, hal. 233.

politik harus diberi jaminan untuk ikut serta berparti - sipasi secara adil dan jujur.

Ternyata saran-saran itu berhasil dengan baik, ini diakui sendiri oleh Presiden Soekarno disaat berpidato - didepan peserta Muktamar NU ke 23 di Surakarta pada tanggal 24-29 Desember 1962 :

Atas advis anggota DPAS yang bernama kyai Wahab Chasbullahitulah, maka kita menjalankan Trikora, dan trikora berhasil saudara-saudara..... pada 1 Oktober bendera Belanda turun di Irian Barat di - ganti bendera UNTEA....pada 31 Desember UNTEA akan didampingi bendera Merah Putihdan 1 Mei - 1963 bendera satu-satunya di Irian Barat adalah - Merah Putih.

Dari semua uraian diatas adalah merupakan contoh tingkah laku politik NU setelah Dekrit Presiden. Dan seperti yang telah penulis ungkapkan di atas bahwa NU memilih sikap devensif atau diam, namun sejarah telah mencatat, dengan sestrategi politik NU itulah PKI agak sulit untuk melancarkan mov-mov politiknya. Sebagaimana kita lihat dalam keinginannya untuk membubarkan HMI hal ini tidak pernah menjadi kenyataan. KH. Saifuddin Zuhri ketika itu sebagai Menteri Agama ummat secara keseluruhan, dan dan juga angkatan darat, membela HMI dari rong - rongan PKI. KH. Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama dari kalangan NU disaat itu benar-benar telah berhasil mencegah

tindakan penguasa hendak membubarkan HMI dan Gasbindo (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia) dibawah pimpinan Yusuf Wibisono, Agus Sudono dan lain-lainnya, juga mendapat serangan dari PKI.²⁰

Memang benar pada saat itu NU dihadapkan pada dua politik yang sama-sama berbahaya tapi politik NU lebih baik menempuh bahaya yang lebih kecil yakni NU dituduh berangkuhan dengan PKI dari pada kena resiko batu karang Presiden Soekarno yang mengakibatkan pembubaran bagi partai itu sendiri.

Namun perlu diingat bahwa kelenturan sikap NU dengan PKI ini maka NU bisa menyingkap rahasia program PKI. Dalam hari ulang tahun surat kabar Duta Masyarakat 5 Januari 1965, NU mengundang Dr. Subandriyo, dalam ceramahnya Dr. Subandriyo menjelaskan sebagai berikut:

Saya sudah melihat tanda dalam tahun 1965 akan terulang lagi. Kita akan berpisah dengan teman-teman sendiri kemarin atau kemarin dulu saya kemukakan hal ini oleh karena sebagai manusia tentu kita akan menangis disebabkan adanya ikatan pribadi sebagaimana kita akan menangis sedih, akan tetapi sebagai pengabdian revolusi tidak ada jalan lain siapa yang tidak dapat mengikuti revolusi baik oleh karena ambisi pribadi atau golongan maupun material mereka dalam keadaan itu harus kita tinggalkan.²¹

Tentu saja apa yang dilukiskan oleh Dr. Subandriyo itu mempunyai kesan yang tidak enak, apa yang dimaksud -

²⁰ Syafiqi Ma'arif, Op. Cit., hal. 120.

²¹ Chairul Anam, Op. cit., hal. 239.

kata perpisahan itu ? tapi NU tampaknya sudah faham dengan gelagat PKI. Tentu saja untaian kata yang dilukiskan oleh Dr. Subandriyo itu adalah merupakan tanda adanya rencana PKI mengadakan perebutan kekuasaan.

Ternyata dugaan NU menjadi jelas setelah terjadinya kodeta tanggal 30 September 1965 yang gagal itu. Yakni suatu tanggal yang menandai bermulanya tahap ketiga dalam sejarah moderen Indonesia.

Dengan demikian NU segera menjalin persatuan dikalangan umat Islam khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya yang dipelopori oleh H. M. Subhan SH. Untuk mengimbangi PKI bila meletus sewaktu-waktu.

Dari sini penulis berasumsi bahwa seandainya NU bersikap kaku maka NU tidak akan dapat hidup dan pasti akan dibubarkan dan sudah barang tentu tidak akan dapat menyingkap rahasia yang sudah direncanakan oleh PKI dengan rapi itu.

Terlepas dari pada jiwa obyektif dan subyektifitas seorang penulis, maka ada benarnya kalau setrategi politik yang diperjuangkan oleh sejumlah tokoh-tokoh diatas hanyalah berdasarkan agama, segala apa yang telah diupayakan hanyalah demi tetap tegaknya negara, nusa dan bangsa serta agama.

C. Langkah-langkah NU Dalam Menghadapi Demokrasi Ter-
Pimpin.

Setelah PKI partai Komunis Indonesia melakukan tindakan yang brutal untuk merebut kekuasaan Negara - Republik Indonesia ke dalam genggamannya dengan cara menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi TNI AD 30 September 1965 dengan cara yang keji dan biadab-tanpa prikemanusiaan, maka sejak itu rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam khususnya NU bersama ormasnya segera mengadakan operasi pengusutan terhadap gerakan G. 30 S PKI bersama ABRI angkatan bersenjata Republik Indonesia.

Pada tanggal 2 Oktober NU mulai membicarakan sikap dan langkahnya dalam menghadapi gerakan terkutuk itu. HM Subhan ZE Ketua III PB NU mengatakan dengan tendas Gestapu dengan gerakan refolosinya adalah gerakan kontra revolusioner 45 yang didalangi oleh PKI beserta ormas-ormasnya, dan disore harinya H. Mahbub - junaidi datang ke Konstrad (Komando strategi angkatan darat) untuk menyampaikan hasil musyawarah pimpinan NU di rumah H. Munasir Kebayoran baru yang mengatakan NU berpendapat bahwa Gerakan 30 September dan Dewan revolusinya adalah gerakan kontra Revolusi 45.²²

²²Ke-HU-AN, Buku Ketiga, Pengurus Wilayah -
Kabarif HU, di Yogyakarta, 1981, hal. 68.

Tepat 5 Oktober 1965 NU mengeluarkan Resolusi - pengutukan PKI. Dalam resolusi ini menuntut agar PKI dan semua ormas-ormasnya dibubarkan dan menyuru kepada seluruh umat Islam dan segenap kekuatan bangsa untuk bersama-sama ABRI mengadakan penertiban kembali di segala bidang akibat gestapu. sikap yang tegas ini ternyata mendapat dukungan yang luar biasa dari segenap lapisan masyarakat, maka keluarlah pernyataan-pernyataan yang senada dari partai-partai politik misalnya Katolik, IPKI, PSI, Muhammadiyah, Gabindo, dan PNI.²³

Sudah barang tentu kalau NU berada di garis depan sebab pada waktu itu NU merupakan partai politik Islam terbesar setelah rapuhnya Masyumi dari arena politik bahkan NU merupakan satu-satunya Imam politik umat Islam - pada waktu itu disamping itu NU mempunyai basis masa yang sangat besar di seluruh pelosok tanah air.

Oleh karena itu tidak heran kalau NU berani menyatakan menanggung akan segala akibat dan resikonya dalam menghadapi PKI demi kepentingan Nusa, bangsa dan agama.

Dengan dalih kepentingan negara dan agama ini PB NU segera menentukan sikap dan langkah-langkah dalam menghadapi tindakan kaum brutal dan kaum murtad di era Demok-

²³Ibid, hal. 68.

rasi Terpimpin itu. PB NU segera menutup gerak langkah -
 PKI dan antek-anteknya dengan memberikan mov-mov liwat
 siaran RRI, publikasi, surat kabar dan majalah baik -
 dalam maupun luar negeri, kemudian dikeluarkan resolusi -
 PB NU yang isinya antara lain: mendesak Presiden Soekarno
 untuk segera membubarkan PKI dan seluruh kacung-kacungunya
 2. Mendesak Presiden Soekarno untuk mencabut surat izin
 (sit) seluruh media cetak baik yang langsung maupun tidak
 langsung membantu PKI. Dan 3 Menyebarkan seluruh umat
 Islam agar membantu sepenuhnya kepada ABRI dalam usahanya
 mengembalikan ketertiban Nasional akibat gerakan G. 30 S/
 PKI.²⁴

Kemudian H. M. Subhan ZE menggalang persatuan pe -
 muda dan pelajar Islam, PMII, HMI, ANSOR, maupun Muhamma-
 diyah lalu lalu kekuatan itu dipadukan dengan kekuatan -
 kekuatan partai politik Kristen dan Katolik, hingga PMKRI
 maka lahirlah Komando Aksi pengganayang gestapu (KAP GES -
 TAPU) yang ahinya berubah menjadi Fron Pancasila. Dan
 fron pemuda KAMI (Kesatuan Sarjana Indonesia) yang persi-
 dium KAMI dipopung oleh Zamrani tokoh muda NU dan Banser
 NU selalu berada di garis depan dalam setiap aksi.

Untuk mencapai tiga jalur tersebut diatas NU menem-
 puh beberapa jalur yang pernah ditempuh sebelumnya antara

 24

 Chairul Anam, Op, Cit., hal. 243-245.

lain eksekutif (Kabinet), legislatif (MPR dan DPR) dan massa. Misalnya dalam Kabinet Dwikora kabinet yang dibentuk setelah peristiwa Gestapu PKI maka Idham Chalid tetap duduk sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama, KH. Fatah Yasin sebagai Menteri Penghubung Alim ulama' yang kemudian digantikan KH. Moh. Ilyas, sedangkan H. Aminudin Aziz sebagai Menteri Negara.

Kemudian dilembaga legislatif baik MPR maupun DPR, NU memegang peranan yang cukup penting KH. Subhan ZE terpilih sebagai wakil ketua MPR KH. Syaihu sebagai Ketua DPR-GR, namun perlu diingat bahwa sejak 13 Desember 1965 harga barang-barang menjadi melonjak naik keatas rakyat semakin gelisah dan resah, dan yakin semuanya ini adalah akibat dari gerakan PKI. Maka kemarahan rakyat semakin membakar hati, dalam saat yang sama terjadilah demonstrasi besar-besaran ke Istana negara yang terdiri dari semua unsur pemuda Mahasiswa mereka dipimpin oleh yahya ubait dari NU menuju gedung sekretaris negara di jalan Feteran Jakarta yang ahirnya terkenal dengan kata TRITURA tiga tuntutan rakyat. Bubarkan PKI, Rombak Kabinet Dwikora dan Turunkan harga.

Tuntutan itu disambut negatif oleh Presiden Soekarno dan dianggap gerakan liar, bahkan kedatangan ini disambut dengan peluru ahirnya tepat tanggal 24 Februari

1966 gugurlah Arif Rahman Hakim sebagai mahasiswa pahlawan Ampera.²⁵

Dengan demikian rakyat bertambah marah tanggal 9 Maret 1966 diadakan sidang istimewa Kabinet tapi tidak ada keputusan apa-apa karena Bung Karno tidak jelas sikapnya. Tanggal 10 Maret terjadi demonstrasi ulang secara besar-besaran, disaat itu Presiden Soekarno terbang ke-Bogor bersama Subandriyo dan Chairul Saleh.

Maka langkah selanjutnya Menteri Pangat Letjen Soeharto menunjukan tiga orang perwira ABRI untuk menghadap Presiden Soekarno di Bogor dan akhirnya keluarlah surat perdatan 11 Maret yang isinya memberikan kuasa Letjen Soeharto untuk menertibkan situasi negara.

Tanggal 12 Maret diadakan pameran kekuatan rakyat dan ABRI dengan segala persenjataan dari seluruh kesatuan berjalan bersama bersatu padu menelusuri urat nadi Ibukota Jakarta, dan mulai hari itulah PKI dan ormas-ormanya dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.²⁶

Kegagalan G.30 S/PKI jatuh hangus dari pelataran bumi Indonesia tetapi lebih dari itu telah membawa pula

²⁵C.T.S. Kansil Dkk, Op. Cit., hal.85.

²⁶Ibid, hal. 82.

Presiden Soekarno dan Demokrasi Terpimpinnya pada kehan -
curan politik secara total. Manipol USDEK yang sebelumnya
dibela dengan gigih oleh semua golongan politik, maka -
setelah terjadinya gerakan G. 30 S/PKI mulai dikutuk pula
bersama-sama oleh mereka, semua yang tadinya tampil seba-
gai pembelanya.

Dari semua akibat itu penulis hanya menyayangkan -
atas tragedi itu, Bung Karno adalah orang berjasa besar
termasuk dalam mempersatukan bangsa Indonesia untuk mer -
deka. Jasa Bung Karno dalam perjuangan kemerdekaan, ter-
masuk juga dalam mengembalikan Irian Barat pada masa -
Demokrasi Terpimpin tidak akan pernah dilupakan orang,
peran besarnya dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang
terdiri dari berbagai suku akan tetap tercatat dengan -
tinta emas dalam sejarah Indonesia.

Bung Karno adalah orang besar, pahlawan revolusi -
yang gagah berani, tapi mengapa justru Bung Karno tidak
membendung tragedi yang akan terjadi itu, yang justru dia
sendiri yang akan memakan buah simalakamahnya. Apakah -
Presiden Soekarno tidak mengetahui hal yang akan terjadi?
penulis hanya beranggapan jangan lagi Presiden Soekarno-
sebagai orang pertama tidak mengetahui, Dr. Subandriyo -
yang sebagai orang kedua saja setelah Soekarno telah me -
ngetahui akan hal semuanya itu. Dalam hari ulang tahun
Duta masyarakat ke 20 Dr. Subandriyo memberikan sinyale -

men bahwa ia mudah mengetahui suatu tanda-tanda akan terjadinya suatu perpisahan dengan teman-teman seperjuangannya di tahun 1965.

Sekiranya hal itu belum terjadi maka keadaan Pre - siden Soekarno dan Demokrasi Terpimpin masih belum mengalami yang begitu parah, tapi berhubung PKI yang mulai akan semua kejadian itu maka mau tidak mau NU harus bersikap keras dengan menunjukkan segala kemampuannya dengan memberangus PKI dari bumi Indonesia.

Bagi NU untuk membasmi semua kejahatan tidak ada jalan lain kecuali NU harus merapatkan barisannya bersama ormas lainnya dan bergabung dengan angkatan bersenjata - Republik Indonesia (ABRI) untuk mengadakan suatu pameran kekuatan dan memberangus PKI dari pelataran bumi Indonesia dan sekaligus menyatakan sebagai partai dan organisasi terlarang di Indonesia. Dengan demikian maka habislah riwayat Presiden Soekarnobersama Demokrasi Terpimpintenggelam bersama sloganits nasakomnya.